

Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru

Munawir Ariffin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali Mandar
Penulis Korespondensi: munawirariffin@unasman.ac.id

Abstract: Since its emerging, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) has often been hit by conflicts, either in the form of individuals or establishing to factions in the internal party. During the New Order period, the conflict and fragmentation of the PPP's elite led the differences opinion. Apart from the differences, the conflict still caused by the institutionalization of parties which tend to be formal in resolving conflict problems. It was including on how to resolve internal problems, thereby allowing external parties (the government) to intervene in the PPP's conflicts.

Keywords: Partai Persatuan Pembangunan; Internal Conflict; New Order.

Abstrak: Sejak kelahiran, Partai Persatuan Pembangunan sering dilanda konflik, baik berbentuk perorangan ataupun melahirkan faksi-faksi dalam konflik internal partai. Masa Orde Baru, konflik dan fragmentasi elit PPP dikarenakan perbedaan pendapat para elitnya. Selain dikarenakan perbedaan pendapat di pihak internal elit, konflik juga disebabkan oleh pelembagaan partai yang cenderung bersifat formal dalam menyelesaikan masalah konflik, termasuk juga ketika PPP seringkali sulit menyelesaikan masalah internal, sehingga memberi peluang pihak eksternal (pemerintah) melakukan campur tangan atau intervensi terhadap konflik PPP.

Kata Kunci: Partai Persatuan Pembangunan; Konflik Internal; Orde Baru

PENDAHULUAN

Sejarah fragmentasi atau perpecahan kekuatan politik hingga menimbulkan konflik baik secara individual maupun kelompok yang membentuk partai Islam, telah lama terjadi jauh sebelumnya. Bahkan, dimasa era Orde Lama (Orla), kekuatan politik Islam mengalami keterbelahan, seperti dalam Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), dan kekuatan lain yang lebih kecil, semisal Persatuan Tarbiyah Islamiah (Perti) dan Partai Serikat Islam Indonesia (Duroduddin Mashad, 2008, hal.2).

Dalam sejarahnya, perpecahan antara komponen politik Islam telah terjadi, baik di era pemerintahan sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, sebenarnya semua komponen politik Islam dapat bersatu dan membentuk suatu partai bernama Masyumi (November 1945). Tetapi akibat daya tarik posisi-posisi politik formal dalam negara, Masyumi akhirnya pecah.

Dimulaidari keluarnya Syarikat Islam (SI) pada Juli 1947 untuk bergabung dalam kabinet aliran kiri pimpinan Amir Syarifuddin (dalam wujud PSII), selanjutnya diikuti oleh NU pada Mei 1952. NU akhirnya bergabung dalam kabinet kubu nasionalis pimpinan Ali

Sastro Amidjojo, sementara Masyumi tampil sebagai oposisi. Fragmentasi jadi kian parah di era Demokrasi Terpimpin, dimana Liga Muslim (NU, Perti, PSII) mendukung penuh pemerintahan otoriter Soekarno. Sementara itu, Masyumi justru memilih politik martir yang berujung pada bubarnya Masyumi pada tahun 1960 (Syafi'i Ma'arif, 1996, hal.41).

Jika dicermati kasus diatas, sebenarnya perpecahan dan konflik dalam kelompok umat Islam yang terjadi pada umumnya berakar dari persoalan kekuasaan. Menurut pengamatan (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1993), hal tersebut mengakibatkan rusaknya hubungan persaudaraan umat yang juga bermula dari masalah politik praktis. Di era Demokrasi Terpimpin, posisi umat ditentukan oleh corak sikap Soekarno dan sistem politiknya dibandingkan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Dimasa pemerintahan Orde Baru, perpecahan juga terjadi dimulai dari adanya kebijakan paksa fusi partai-partai Islam dalam suatu wadah bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kebijakan Orde Baru terkait fusi partai ini, dikarenakan Orde Baru melihat bahwa biang kekacauan yang mengganggu stabilitas politik, antara lain adalah partai-partai. Partai-partai politik

dianggap berperan mengganggu stabilitas. Hal ini berdasarkan pengalaman Demokrasi Parlementer dimana pemerintah selalu berganti-ganti diakibatkan oleh partai-partai politik (Syafi'i Ma'arif, 1996, hal.99).

Setelah Pemilu 1971, tepatnya tahun 1973, kedua kelompok tersebut harus melakukan fusi. Kelompok pertama, yang terdiri dari partai-partai Islam, bergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok kedua, yang terdiri dari partai Nasionalis dan Kristen, membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan adanya fusi ini partai-partai politik yang ada menjadi tiga, yaitu PPP, PDI, dan Golkar.

Fusi dimasa Orde Baru sesungguhnya menguntungkan partai Golkar, sebagai partai pemerintah, karena Golkar tidak bergabung dalam fusi yang ada. Sehingga bagi golongan Islam, adanya fusi tersebut sebenarnya dapat menguntungkan juga karena partai-partai Islam yang tadinya terpecah-pecah sekarang sekarang terintegrasi dalam satu wadah partai, tetapi secara substansial friksi justru muncul kembali, yang puncaknya tercermin dari langkah NU menggembosi PPP.

Argumentasi yang dimunculkan NU adalah kembali ke Khittah 1926 dengan menampilkan wajah Jam'iyah. Namun dibalik retorika politik tadi, sebenarnya terdapat alasan mendasar, NU kecewa dengan dominasi unsur Muslimin Indonesia (MI) dalam PPP, sehingga unsur NU merasa dimarginalkan, termasuk penajatan kursi legislatif. Menyusul fragmentasi itu, akhirnya sebagian "Kyai PPP" beramai-ramai menjadi "Kyai Golkar".

Dalam konteks PPP, fenomena fragmentasi politik Islam muncul lagi. Antara komponen Islam seolah tumbuh *crisis of mutual trust*, sehingga hanya memiliki sedikit perbedaan visi, tokoh-tokoh Islam membuat partai sendiri, bahkan meski tak memiliki basis memadai (Duroduddin, 2003 hal.16. Beberapa partai Islam tak memiliki kursi dalam pemilu tahun 1999 lalu adalah contohnya. Bahkan, suasana menjelang, dan setelah pemilu 1999 telah menunjukkan banyak bukti betapa politik Islam memperlihatkan keterbelahan yang telah mengarah pada konflik dan perpecahan elit partai, semisal konflik elit dalam tubuh PPP karena memperebutkan jabatan pucuk pimpinan partai.

Selain itu, pemilihan umum yang menuntut partai-partai Islam untuk mendulang suara dan mendudukkan wakilnya di parlemen mengharuskan elit partai PPP yang didalamnya

memang memiliki latar belakang, prinsip dan ideologi Islam yang berbeda terutama pada saat pemilu 1999. Dhoruroddin melihat bahwa fenomena jelang pemilu 1999, dimana pada saat itu NU telah membentuk partainya sendiri yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengharuskan elit NU dibeberapa daerah yang pada awalnya berada di PPP sengaja menggembosi PPP agar Nahdliyin (warga NU) memilih PKB. Memang konflik yang terjadi antara elit dalam PPP maupun antara PPP dan PKB lebih teraktualisasi dalam wujud konflik retorika, dan tidak sampai pada perpecahan fisik.

Bahkan simpatisan PKB baik di tingkat nasional maupun lokal umumnya sempalan PPP, beberapa diantaranya dari Golkar. Mereka yang dari PPP ditingkat nasional ada Mathori Abdul Djalil atau Khofifah Indar Parawansa. Politik loncat pagar seperti ini menyebabkan PPP merasa dikhianati, sehingga menumbuhkan benih perseteruan. Sebaliknya sebagian tokoh NU yang memilih tetap dalam PPP, oleh kaum Nahdliyin PKB dinilai tak memiliki solidaritas akibat mendukung partai yang telah memarginalkan NU dan penyokong Orde Baru. Pertentangan internal ini akhirnya kian terkondisikan oleh sikap politik kyai yang terkotak-kotak dalam berbagai kepentingan politik yang berbeda itu (Duroduddin, hal. 200-201).

Hal tersebut diatas memperlihatkan bahwa, betapa konflik kepentingan yang terjadi jelang pemilu senantiasa menyebabkan PPP dirundung masalah internal. Terutama konflik antar elit dan terbentuknya faksi baru yang membentuk partai diluar PPP yang sering terjadi seperti jelang pemilihan umum 1999 untuk memperebutkan suara dan kekuasaan terutama kursi di parlemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama, kajian literatur. Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan (*literature review*) atau analisis dokumen, yakni mengumpulkan data yang bersifat sekunder yang diperoleh melalui sejumlah literatur kepustakaan seperti buku, majalah, artikel, jurnal maupun berita koran melalui media elektronik maupun non elektronik atau jenis-jenis tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelahiran Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Pasca jatuhnya rezim Orde Lama, maka kelahiran Orde Baru disambut dengan penuh harapan oleh kalangan Islam. Dengan jatuhnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru, umat Islam berharap kekuatan Islam kembali ke panggung politik nasional. Dalam konteks ini kalangan, kalangan Islam modernis ada keinginan untuk merehabilitasi Masyumi, yang pada demokrasi terpimpin dibubarkan oleh Soekarno. Dalam rangka itu, kemudian pada tanggal 16 Desember 1965 dibentuk Badan Koordinasi Muslimin (BKM) yang terdiri dari 16 organisasi Islam. Maka mereka melakukan *lobbying* ke pemerintah dan mengeluarkan pernyataan tentang perlunya rehabilitasi Masyumi.

Tentunya keinginan untuk melakukan rehabilitasi Masyumi mendapat pelarangan dari pemerintah. Hal ini tentu mengecewakan kalangan Islam, terutama kalangan Islam Modernis. Dengan adanya pelarangan tersebut, para Pemrakarsanya lalu berusaha membentuk partai politik Islam lainnya, maka terbentuklah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Pemerintah mengizinkan berdirinya Parmusi tersebut. Hal ini karena pemerintah melihat bahwa partai-partai Islam yang ada (NU, PSII, dan Perti) belum mewadahi kalangan modernis, karena NU dan Perti berorientasi tradisional dan PSII meskipun berorientasi modernis tetapi kurang dikenal.

Dengan berdirinya sejumlah partai-partai Islam tersebut, dan dalam sejumlah kebijaksanaan politik, pemerintah Orde Baru melakukan reorganisasi dan refungsionalisasi, baik pada tingkat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan stabilitas politik sebagai landasan terlaksananya pembangunan ekonomi. Bagi Orde Baru, stabilitas politik merupakan prasyarat terlaksananya pembangunan. Pembangunan bisa dilaksanakan, menurut Orde Baru, apabila adanya stabilitas politik. Sehubungan dengan itu, maka langkah yang dilakukan Orde Baru adalah penyederhanaan (fusi) partai politik, sehingga Partai Persatuan Pembangunan lahir.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai politik Islam di Indonesia, partai ini dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta. PPP merupakan hasil gabungan (fusi) dari empat partai politik Islam warisan pemerintah Orde Lama: Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII),

Partai Tarbiyah Indonesia (Perti), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Fusi dan Deideologisasi PPP

Dalam perspektif politik historis, fusi keempat partai Islam dalam PPP dapat dinilai sebagai awal persatuan parpol Islam dalam sejarah Indonesia. Sebab, ketika Masyumi terbentuk di awal kemerdekaan, masih ada Perti yang tidak mau bergabung didalamnya. Sehingga upaya fusi terhadap parpol Islam dalam PPP sebagai unsur pemaksaan oleh rezim Orba. Menurut (Syamsuddin Haris, 1991, hal. 48), kelahiran PPP dimasa Orba karena faktor eksternal dimana rezim Orba saat itu menginginkan penerapan model massa menggambang (*floating mass*).

Upaya fusi partai-partai yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto tentulah berdampak pada kondisi internal termasuk ideologi dan asas dari partai-partai Islam yang tergabung dalam fusi, terkhusus juga pada PPP. Awalnya PPP menggunakan asas Islam, tetapi dalam perjalanannya tahun 1984 akibat tekanan politik pemerintah Orde Baru, PPP menanggalkan asas Islamnya menggunakan asas Pancasila, serta mengganti gambar Ka'bah dengan bintang segi lima, salah satu gambar yang terdapat dalam burung Garuda.

Selain itu kehadiran dan eksistensi PPP sebagai partai politik Islam dimasa Orde Baru dipandang sebagai salah satu upaya penghapusan politik aliran yang begitu kuat di masa Orde Lama. Menurut (Fachry Ali, 1996, Hal. 34), eksistensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan pratanda keunikan dunia politik Indonesia: berlanjutnya dunia politik "aliran" pra-Orde Baru. Partai-partai politik tegak lebih pada persamaan kultur politik dan bukan pada program-program yang jelas, yang mengikat pengikut secara lintas kultural.

Sejak awal Orde Baru, usaha-usaha serius menghapus dunia politik "aliran" ini sudah dilakukan. Dalam beberapa hal, kehadiran Golkar ditujukan untuk menghancurkan struktur dan dunia politik "aliran" itu. Didukung kaum sekuler, Golkar pada mulanya tampil sebagai parpol pasca-aliran, dengan mengesampingkan sentiment ideologi dan kultur. Sebagai partai tanpa ideologi, dengan slogan-slogan pragmatisme, Golkar sekaligus menunjukkan dirinya sebagai diskontinuitas dari elemen-elemen struktur dan dunia politik "aliran". Selama lebih dari satu dekade, usaha mengikis pengaruh dunia politik "aliran" ini tampaknya efektif dan panggung

politik Orde Baru hampir sepenuhnya didominasi tokoh-tokoh politik “modernis-sekuler”.

Diawal fusi yang idealnya memiliki makna peleburan tuntas, tanpa mempersoalkan unsur, dalam realitas politiknya masih mengidentifikasikan diri dalam unsur asal, termasuk pertentangan tokoh baik mengidentifikasikan diri sebagai unsur tradisional maupun moderen. Ini dapat dilihat dari pertentangan antara tokoh NU yang mayoritas berada di Majelis Syuro, sementara tokoh Parmusi (setelah fusi berubah menjadi MI) duduk dikursi eksekutif.

Namun, dalam perkembangannya terjadi rivalitas dalam internal dan terkait dengan pucuk pimpinan partai, yang mencapai puncaknya pada era H.J. Naro, yang menyingkirkan banyak tokoh NU dari jajaran pengurus partai. Sehingga konflik antar faksi dan elit di internal PPP tetap berlangsung ditengah upaya dan rekayasa politik Orba terhadap penyederhanaan parpol Islam itu sendiri.

Hal ini juga berdampak pada pencapaian kursi PPP dalam setiap pemilu yang cenderung stagnan, seperti halnya semisal pada pemilu tahun 1997 dan 1999 diawal reformasi. Perolehan kursi yang relatif dan upaya fusi dalam rangka penyatuan kelompok Islam dalam PPP hanyalah bersifat kelompok semu (unsur-unsur PPP), ini dapat dijelaskan menurut (Nasikun, 1991, Hal 9-23), bahwa karena didalamnya berkembang kelompok kepentingan karena faktor ideologi, faktor politis suatu organisasi, dan faktor sosial suatu organisasi.

Setelah tumbanganya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto, PPP kembali menggunakan asas Islam dan Lambang Ka’bah melalui Muktamar IV di akhir tahun 1998. Kemudian pada Muktamar V tahun 2003 disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD), PPP bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibawah ridho Allah Subhana Wata’ala (Zuly Qodir, Hal. 246-247).

Sebagaimana diketahui bahwa PPP lahir dari faktor eksternal dan sejarah masa lalu, dimana politik Islam dan Islam Politik mengalami pergesekan, baik secara eksternal terhadap ideologi lain diluar Islam, maupun internal kelompok Islam politik (partai). Ketika lahir pada masa Orde Baru, tak heran perpecahan dan konflik faksi elit di internal PPP

sering terjadi. Padahal, sejatinya fusi ini diharapkan menjadikan partai Islam menjadi partai transideologi, yang terdiri dari sayap Islam modernis dan tradisional, dengan kebijakan ini fragmentasi tidak akan terjadi.

Memang, pada era Orde baru fragmentasi politik Islam tidaklah seakut masa sebelumnya. Namun, harapan tidak terjadinya fragmentasi golongan ternyata sulit, fenomena ini bukan diakibatkan oleh tumbuhnya kesadaran inklusivisme yang berkembang dalam lingkungan politik Islam, tetapi lebih diakibatkan langsung dari dikembangkan politik deideologisasi dan *floating mass policy* Orde Baru, sehingga dapat memarjinalisasi terjadinya konflik aliran.

Salah satu kebijakan Orde Baru dalam melaksanakan deideologisasi adalah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal partai politik. Pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal berdasarkan pengalaman politik masa pemilu sebelumnya. Pada pemilu 1977, misalnya, terjadi pertarungan “Pemerintah vs Islam”, karena Golkar dianggap sebagai partai pemerintah harus berhadapan dengan Islam.

Sedangkan pada pemilu 1982, terjadi peristiwa Lapangan Banteng, dimana massa Golkar yang sedang menghadiri kampanye dikejar-kejar oleh massa PPP. Dengan demikian, pemerintah pemerintah merasa perlu melakukan penataan ke arah kesatuan orientasi dengan menerapkan asas tunggal. Dengan asas tunggal juga diharapkan identitas yang bersifat primordial akan pudar pada partai-partai dan ormas.

Melihat bahwa (1) asas tunggal partai menafikan kebhinekaan masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinan masing-masing. Keyakinan ini bisa bersumber pada ajaran agama dan pemahaman lain; (2) asas tunggal partai menghalangi orang-orang yang sama keyakinan untuk mengelompokkan sesamanya serta bertukar pikiran sesamanya berdasarkan keyakinan, termasuk agama, yang dianut masing-masing; (3) asas tunggal partai menafikan hubungan antara agama dan politik; (4) asas tunggal partai mengandung kecenderungan ke arah sistem partai tunggal; (5) asas tunggal partai menghalangi kemungkinan pengembangan faham-faham, seperti yang bersumber dari agama, yang mungkin memperkuat Pancasila (Deliar Noer 1983, hal. 60-61).

Bagaimana dengan PPP? Menurut Deliar Noer, bila PPP menerima gagasan asas

tunggal seakan-akan PPP mengakui: (1) bahwa dalam Islam ada pemisahan antara agama dan politik; (2) bahwa Islam sekan-akan tidak sesuai dengan tuntutan zaman, sekurang-kurangnya dalam bidang politik; dan (4) bahwa kekacauan dalam kampanye pemilu disebabkan karena PPP masih menggunakan asas Islam, selain Pancasila. Ternyata dalam perkembangannya PPP menerima asas tunggal Pancasila.

Penerimaan PPP terhadap asas Pancasila tidak lepas dari keberadaan Tap MPR tahun 1983. Maka, setiap kekuatan partai politik harus berasaskan Pancasila, dan tidak boleh ada asas lain. Dalam Muktamarnya PPP kemudian mengganti asas Islam menjadi asas Pancasila. Disamping itu, lambang PPP yang tadinya Ka'bah diganti menjadi Bintang. Penggantian asas dan lambang PPP tersebut menimbulkan pro dan kontra yang cukup hangat. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan proses deislamisasi politik dan depolitisasi Islam. Tetapi ada juga yang menggunakan istilah lebih lunak: deformalisasi Islam, yaitu proses penanggalan bentuk-bentuk formal (Deliar Noer 1983, hal.55).

Deideologisasi dan deformalisasi Islam yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui asas tunggal Pancasila, juga berdampak pada perkembangan golongan atau kelompok Islam yang ada dalam PPP, terutama NU. Sehubungan dengan penerapan asas tunggal yang diharuskan bagi partai maupun ormas, NU akhirnya menerima asas tunggal Pancasila dan menanggalkan asas Islam melalui Munas Alim Ulama di Situbondo pada tahun 1983 dan mengukuhkan asas tunggal Pancasila yang dicantumkan dalam AD ART NU melalui Mukhtar NU di tahun 1984. Sekaligus NU menyatakan diri keluar dari PPP dan kembali ke Khittah 1926. Artinya NU kembali kefitrahnya semula yaitu sebagai *Jam'iyah Diniyah* (organisasi sosial keagamaan) yang tidak lagi terkait secara organisatoris dengan PPP.

Konflik di Internal PPP Masa Orde Baru.

Pasca fusi PPP yang didalamnya 1973, seluruh partai politik dengan latar belakang ideologi Islam, yaitu NU, PSII, Perti dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) telah melebur didalam PPP. Sekali lagi, partai Islam menjadi partai transideologi, yang terdiri dari sayap Islam modernis dan tradisional. Dengan kebijakan ini, fragmentasi tidak mungkin terjadi.

Meski demikian, PPP, khususnya menjelang pemilu 1970-an dan awal 1980-an, mengalami konflik internal berkepanjangan.

Hal ini dipicu oleh persaingan antarunsur, khususnya unsur NU yang mewakili kelompok tradisional dan Parmusi yang mewakili kelompok modernis (Syamsuddin Haris, 1991). Kedua unsur sama-sama ingin mengembangkan pengaruhnya dalam partai dan memperoleh semaksimal mungkin jabatan-jabatan strategis dan khususnya memperoleh lebih banyak kursi di parlemen.

Walaupun NU adalah unsur terbesar di PPP, namun Parmusi dalam waktu cukup lama mampu memimpin partai dan membuat kondisi NU kurang berpengaruh. Setelah munculnya serangkaian kebijakan yang tidak adil, yang didukung oleh Parmusi, pada tahun 1982 NU memutuskan keluar dari PPP. Meski demikian, NU masih membolehkan anggotanya sebagai individu aktif dan berkiprah dalam PPP.

Pada tahun 1985, PPP dipaksa oleh Rezim Orde Baru untuk menjadikan Pancasila sebagai asas partai dan mengganti Ka'bah dengan Bintang sebagai simbolnya. Situasi ini mereduksi citra PPP sebagai sebuah partai Islam dan di saat yang sama memberikan Golkar peluang menjadi kompetitor serius untuk menarik banyak pemilih muslim. Sering dengan berjalannya waktu, peran PPP di kancah perpolitikan nasional cenderung kurang signifikan dan tampak semata sebagai unsur pelengkap di dalam sistem politik nasional (Firman Noor, hal. 71-72).

Menurut Syamsuddin Haris (1991), PPP baru mengalami konflik internal yang serius ketika menjelang pemilu 1982, unsur NU dalam Fraksi Persatuan Pembangunan di DPR melakukan *walk out* pada sidang pengesahan UU Pemilu di DPR karena menolak materi RUU yang disetujui oleh unsur MI, SI dan Perti. Konflik internal PPP mencapai puncaknya ketika akhirnya kaum *nahdliyin* memutuskan keluar dari PPP dan kembali ke *khittah* 1926 melalui Mukhtar NU di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984.

Sumber utama konflik tampaknya adalah kekecewaan kalangan NU terhadap susunan daftar Caleg DPR dari PPP menjelang Pemilu 1987 yang mencoret sejumlah tokoh *nahdliyin*. Kepemimpinan J. Naro yang cenderung akomodatif terhadap kekuasaan Orde Baru, menjadi salah satu faktor penting dibalik konflik internal PPP selain campur tangan pemerintah dalam melembagakan konflik, sehingga pamor partai Islam ini pun berangsur-angsur merosot. Akibatnya, perolehan suara PPP merosot tajam dari 27,11 persen pada pemilu 1977 dan 19,29 persen

(1982), menjadi 15,97 persen pada pemilu 1987, kendati kemudian sedikit naik menjadi 17 persen pada 1992, dan 22,43 pada pemilu 1997 (Syamsuddin Haris, 2014, hal. 71).

Selain itu, sesungguhnya fusi dan intervensi pemerintah dalam konflik PPP, menurut Sudirman Tebba(2001, hal. 12), agar rezim Orde Baru ini dapat mengontrol dengan mudah situasi politik di dalam partai-partai tersebut (PPP dan PDI, Golkar). Serta adanya penggabungan partai-partai tersebut merupakan taktik rezim Orde Baru menjadikan ketiga partai ini PPP, PDI dan Golkar untuk dijadikan sebagai kendaraan politik yang berfungsi memperkokoh kekuasaannya serta menarik massa.

Dalam sejarah kepemimpinan PPP, baru kali ini Partai Ka'bah mengalami konflik hingga membuat faksi terbelah dua hingga di parlemen. Selama kepemimpinan Mohammad Syafa'at Mintaredja (1973-1978), Djailanni Naro (1978-1989), Ismail Hassan Metareum (1989-1999), dan Hamzah Haz (1998-2007). PPP belum pernah pecah dan bertarung hebat hingga di parlemen, walau tak bisa di pungkiri juga bahwa di masa Orde Baru konflik internal juga melanda PPP (Jurnal Nasional, 2014). Dalam catatan Syamsuddin Haris (1991), setidaknya PPP dimasa Orde Baru konflik tersebut dapat dilihat dalam kolom peta konflik internal PPP dibawah ini:

Tabel 1. Peta Konflik Internal PPP selama Orde Baru

Kasus	Pihak Konflik	Materi Konflik
Pernyataan keprihatinan 50 tokoh masyarakat yang disampaikan di DPR (Petisi 50) pada tahun 1980.	NU dan MI	- Rahmat Muljomisen o dan Nuddin Lubis dari NU "mendukung dan dapat memahami" pernyataan 50 tokoh mengenai keprihatinan mereka dengan pidato tanpa teks dari Presiden Soeharto di Ria dan Cijantung, Jakarta
	Perebutan Kursi Ketua Komisi VII DPR pada 1980	NU dan MI
	Pengajuan DCS PPP untuk Pemilu 1982	NU dan MI
		tentang tugas ABRI yang sangat penting masa Orde Baru. - Pihak MI yang disuarakan oleh Soedardji mengecam isi pernyataan tersebut - NU Dan MI Ingin Menempati Kursi Ketua Komisi VII. Sebelumnya pada 1979, MI minta kursi ketua Komisi VII dan bersedia melepas kursi Ketua Komisi VII dan Wakil Ketua Komisi APBN yang dipegangnya . Permintaan ini dikabulkan dan disepakati untuk "dikembalikan" setahun berikutnya. Ketua Umum PPP, J. Naro, mengajukan DCS PPP untuk Pemilu 1982 tanpa sepengetahuan orang DPP yang lain, terutama kalangan NU.

Kasus	Pihak Konflik	Materi Konflik	Kasus	Pihak Konflik	Materi Konflik
Sikap NU yang menuntut Naro agar menegakkan prinsip-prinsip musyawarah partai pada tahun 1983	Idham Sjaifuddin Zuhri/Imam Sofyan dan J. Naro	- J. Naro melakukan perubahan DPP tanpa sepengetahuan Presiden Partai, Idham Chalid, dan anggota DPP yang lain.	gambar pada tahun 1985		berjumlah 18 orang. Kelompok 18 ini membentuk DPP tandingan dengan Syahmanaf sebagai Ketua Umum dan Syarifuddin Harahap sebagai Sekjen.
Pembentukan Panitia Muktamar I pada 1984	Idham Chalid dan J. Naro	- Idham Chalid dan J. naro membentuk Panitia Muktamar dengan ketua, Darussamin, tanpa sepengetahuan Idham Chalid selaku Presiden Partai sehingga panitia itu dianggap tidak sah.	Perubahan Pimpinan FPP di DPR tanpa sepengetahuan DPP pada 1985.	Soedardji dkk dan J. Naro	- Guna memperkuat kelompoknya lalu Soedardji mengadakan perubahan susunan pimpinan FPP secara sepihak. Mereka yang tergeser (Imam Sofyan, Nurhasan Ibnu Hajar, Lukman Hakim, Djafar Siddiq) dibantu J. Naro membentuk FPP tandingan berkantor di DPP.
Pembahasan Pasal 18 ayat 1 RUU Pemilu mengenai tanda gambar orpol (1984-1985)	Soedardji/Syarifudin H/B. Taman Achda dan J. naro	- Kelompok Soedardji Berpendapat Bila PPP Sudah Menerima Asas Tunggal Maka Tanda Gambar Ka'bah Yang Berbau Islam Harus Diganti.	Isu "Momernisasi"	Ridwan Saidi dan J. Naro	- Ridwan Berpendapat Formula-Formula Islam Dalam PPP Harus Dibuang Bila PPP Menerima Asas Tunggal. Isi Pernyataan
Kegagalan menggeser Naro dengan isu tanda	"Kelompok 18" (Soedardji dkk dan Naro)	- Soedardji menyusun kekuatan hingga			

Kasus	Pihak Konflik	Materi Konflik	
Pengajuan DCS PP untuk Pemilu 1987 pada 1986	Soedardji dkk dan J. Naro	- Itu Diprotos J. Naro. - J. Naro mengajukan DCS PPP untuk Pemilu 1987 dengan menggeser kelompok Soedardji dari daftar. - Soedardji membuat daftar yang lain tetapi di tolak oleh Mendagri.	yang idealnya memiliki makna peleburan tuntas tanpa mempersoalkan unsur, dalam realitas politiknya masih mengidentifikasi diri dengan unsur asal. Melalui penggemboosan politik oleh NU, dan diikuti oleh lahirnya fenomena kyai-Golkar, secara politis telah memberi arti bahwa PPP menjadi tak terlalu kuat untuk mengklaim dirinya sebagai wakil suara Islam. Di tengah kian marginalnya legitimasi ideologis-politis bagi PPP itulah, pemerintah melahirkan scenario politik baru untuk mengakhiri eksistensi partai Islam secara tuntas. Melalui UU No. 5/1985 pemerintah secara legalistik mengharuskan adanya penyeragaman asas Pancasila. Dengan keputusan ini, terjadilah apa yang disebut desakralisasi PPP, dengan mengganti lambang Ka'bah menjadi Bintang. Langkah ini secara formal menandai tidak ada lagi partai politik yang mengklaim sebagai partai Islam, yang berarti pula akhir dari politik Islam secara formal. Dalam konteks ini kiranya benar apa yang dikatakan Suryadinata bahwa dengan mengajukan Pancasila, pemerintah dapat mematikan ideologi Islam (Suryadhinata, 1982, hal. 105).
Surat Sumatera Utara Ke FPP Mertua Mardinsyah, Sekjen DPP PPP, 'berbau PKI'.	Soedardji Dkk Dan Mardinsyah/J. Naro	- Soedardji berkesimpulan bahwa Mardinsyah tentu berbau PKI juga. Karena itu, Soedardji selaku ketua FPP me- <i>recall</i> Mardinsyah dari keanggotaan DPR.	Secara substantif, deideologisasi Islam yang dialami PPP dan organisasi kemasyarakatan tidak serta merta menghilangkan kegairahan politik umat Islam. paling tidak kepedulian terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan posisi umat Islam tetap menjadi bagian yang diperjuangkan melalui partai politik. Karena PPP merupakan satu-satunya partai yang secara historis lahir dari partai-partai Islam, maka dalam kondisi asas tunggal Pancasila sekalipun, PPP tetap menjadi tumpuan dalam memperjuangkan aspirasinya. Bahkan, dengan asas tunggal, PPP tidak lagi berdiri secara eksklusif-simbolik sebagai partai Islam, namun dalam perjuangannya ruh Islam tetap menjadi bagian. Terjadi substansialisasi perjuangan dari ranah simbolik ke ranah yang lebih inklusif (Bakir Ihsan, 2016, hal. 117).

Sumber: Haris, 1991: 171-174.

Pada masa Orde Baru sebenarnya sempat muncul romantisme politik Islam, yang telah mati suri di era Demokrasi terpimpin. Harapan baru ini terutama dilandaskan pada fakta tentang jasa-jasa mereka ketika bersama ABRI menumbangkan Orde Lama dan kekuatan PKI. Bahkan, isu-isu atas nama Islam kala itu menjadi semangat penumbangan Orde Lama, sehingga kemenangan Orde Baru akhirnya dianggap sebagai kemenangan Islam. Dapat dipahami jika isu ideologi Islam setidaknya Piagam Jakarta sempat kembali mengemuka, disamping keinginan menghidupkan kembali Masyumi ataupun Partai Islam Indonesia. Bahkan sempat pula muncul keinginan mendirikan Partai Islam baru, Partai Demokrasi Islam Indonesia yang diintrodusir oleh Mohammad Hatta (B.J Bolan, 1985, hal. 148).

Menurut Dhuroruddin (2008), terkait fusi PPP, merupakan hasil rekayasa Orde Baru, akhirnya melahirkan fragmentasi internal. Fusi

Dalam konteks yang hampir sama, PPP walaupun sudah "sekuler" secara ideologi, namun nilai-nilai agama (Islam) tetap menjadi bagian di dalamnya. Hal ini merupakan gejala umum dalam demokrasi modern yang menempatkan agama lebih sebagai nilai dari pada simbol dalam perjuangan politik. Agama sebagaimana terjadi di negara-negara demokrasi seperti Amerika, menjadi kekuatan pendorong bagi keaktifan warga dalam proses partisipasi politik bagi kepentingan publik

(David C. Leege & Lyman A. Kellstedt (ed) 2006, hal. 24).

Konflik Faksi NU dan MI

Sumber utama konflik elit PPP di masa Orde Baru bisa dikatakan sifatnya kelompok dalam unsur PPP, terutama adalah NU dan Parmusi. Dan konflik yang terjadi akibat perbedaan pendapat tentang jatah kursi atau representasi pencalonan dalam setiap pemilu yang ada, terutama jelang pemilu tahun 1997. Selain itu konflik dalam memperebutkan kursi pimpinan PPP antar elit satu dan lainnya juga menjadi penyebab betapa PPP di masa Orde Baru tidak lepas dari konflik sehingga berdampak pada kondisi internal dan perolehan suara pada pemilu di masa Orde Baru.

Bagi NU, peleburan PPP ini seperti kembali ke masa dimana ia menjadi bagian dari Masyumi. Dapat diramalkan, sebagian problem dan konflik lama muncul kembali ke permukaan, kecuali seandainya ketimpangan antara kekuatan massa pendukung yang besar dan jumlah politisi yang berkeahlian dapat diatasi dengan baik. Namun posisi awal NU lebih baik sekarang, karena NU mulai sebagai kelompok dominan didalam PPP. Anggota NU mendapatkan jatah yang adil dalam jabatan pengurus. Ketua Umum PBNU, Idham Chalid diberi kedudukan bergengsi, tetapi tidak sangat berpengaruh, sebagai presiden partai. Jabatan yang lebih berpengaruh sebagai ketua eksekutif diberikan kepada Mintaredja dari Parmusi (Martin Van Bruinessen, 1994, hal. 158).

Pengaruh konflik internal antara Faksi NU dan Parmusi, juga disebabkan karena Kiyai NU yang duduk dalam jabatan strategis PPP semisal Rais Aam NU KH. Bisri Syansuri sangat keras dan lantang melakukan penolakan-penolakan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru, apalagi yang berkaitan dengan agama. Misalnya konfrontasi terhadap rencana UU Perkawinan yang disusun pemerintah pada sidang DPR 1973. Termasuk konfrontasi ulama NU di PPP terhadap pemerintah yang melakukan tekanan melalui militer dan penguasa sipil kepada calon pemilih untuk memilih Golkar jelang pemilu 1977. Dan terakhir konfrontasi yang paling serius adalah pada Sidang Umum MPR tahun 1978, dimana para anggota NU dan kelompok lainnya di PPP meninggalkan tempat sidang (*walk out*).

Sekali lagi NU melancarkan protesnya dengan (*walk out*) ketika sebuah undang-undang baru yang mengatur proses pemilu, setelah terjadi perdebatan panjang dan terbuka,

di bawa ke sidang DPR. Kali ini bukan masalah yang bersifat agama yang dipertaruhkan, tetapi prinsip kekuasaan yang demokratis. Partai-partai (PPP dan PDI) menginginkan agar undang-undang tersebut memuat jaminan-jaminan ketakberpihakan pemerintah dalam proses pemilu, tetapi pemerintah tidak bersedia memberikannya. Pimpinan PPP yakni Naro, mengalah dan memerintahkan anggotanya untuk menyetujui undang-undang tersebut. Namun, NU tetap tak mau menyerah, semua anggotanya secara terang-terangan tidak mau masuk ke ruang sidang ketika undang-undang tersebut disahkan (Umaid Radi, 1984, hal. 163).

Reaksi NU terhadap pemerintah dengan bersikap konfrontatif berdampak pada PPP. Reaksi yang pertama adalah pergantian Ketua Umum PPP, Mintaredja dengan Djaelani (John) Naro yang telah diatur rapi melalui manipulasi politik yang dijalankan Ali Murtopo. Bahkan tanpa ada undangan rapat pengurus, apalagi Mukhtamar, Naro mengumumkan dirinya sebagai ketua yang baru. Naiknya Naro sebagai pucuk pimpinan PPP yang bisa dikatakan akomodatif terhadap pemerintah dan juga dari Fraksi Parmusi menjadikan sebuah upaya pelemahan peranan NU di PPP (Maksoem Machfoedz, 1983. Hal. 248).

Walaupun sebenarnya, pelemahan peranan NU didalam PPP sudah berlangsung sebelumnya. Pada Mukhtamar partai ini ditahun 1975, sudah disetujui bahwa jumlah kursi NU, MI, SI dan Perti dalam pemilu 1971 dijadikan sebagai ukuran tetap dari kekuatan masing-masing. Pada pemilu berikutnya, para calon dalam daftar PPP harus dibagi adil bagi keempat komponen ini dalam proporsi berdasarkan hasil pemilu 1971, dengan beberapa penyesuaian untuk membantu partner lebih kecil. Perolehan pemilu 1977 menunjukkan adanya peningkatan bagi PPP, tetapi karena redistribusi kursi NU kurang sedikit, dari 58 kursi menjadi 56 kursi.

Selain itu, menurut Maksoem Machfoedz (1983), pukulan telak bagi NU ketika Naro secara sepihak mempersiapkan daftar calon untuk pemilu 1982 di mana proporsi anggota NU menurun drastis, dan kebanyakan anggota NU yang vokal seperti Yusuf Hasjim, Syaifuddin Zuhri, dan Imam Rosjadi diletakkan di urutan sangat bawah dalam daftar tersebut sehingga mereka tidak mungkin terpilih. Walaupun ada protes keras, pemerintah menerima daftar Naro sebagai satu-

satunya daftar sah. Jelang dan saat pemilu 1982 dimana 29 orang calon NU tergusur dari nominasi calon terpilih mewakili PPP. Akibatnya, banyak tokoh NU yang kecewa dan mencabut dukungan kepada PPP (Andree Feillard, 1995, hal. 133).

Kejadian ini memperburuk konflik antara faksi NU dan faksi Muslimin Indonesia (MI) di dalam PPP, dan di dalam NU sendiri, kejadian ini menimbulkan perdebatan panas tentang kegunaan ikut serta dalam politik parlementer. Para politisi yang dibersihkan menyatukan suaranya dengan para tokoh yang lain, karena berbagai alasan, mengusulkan NU keluar dari PPP dan meninggalkan politik praktis.

Pada 1989, Ismail Hasan Metareum terpilih sebagai ketua Umum PPP. Itu pun tidak melalui pemilihan yang mulus. Orde Baru yang saat itu sudah tak lagi mesra dengan Naro karena pengajuan dirinya sebagai wakil presiden di Sidang Umum MPR 1988, berusaha memasukkan calon yang diajukan Soeharto, Mahdi Tjokroaminoto, namun ia ditolak peserta muktamar.

Tak ingin Naro atau orang-orangnya kembali menguasai PPP, sebagai jalan tengah terpilihlah Ismail Hasan Metareum. Sebenarnya saat itu ada calon lain, Hartono Mardjono, yang sering dipersepsikan memiliki garis ideologis Masyumi. Tapi tentu saja mustahil dia direstui pemerintah saat itu. Akhirnya ketika Metareum menjabat sebagai ketua umum PPP, kedekatan termasuk pencalonan Soeharto dalam pemilu tahun 1993-1998 senantiasa mendapat dukungan dari PPP (Burhan Magenda (ed), 1992, hal. 173-174).

KESIMPULAN

Sebagaimana diketahui bahwa premis umum yang dapat kita ketahui dari kelahiran PPP dan konflik internal dimasa Orde Baru terjadi karena faktor eksternal dan sejarah masa lalu, dimana politik Islam dan Islam Politik mengalami pergesekan baik terhadap ideologi di luar Islam, maupun di internal kelompok Islam politik (partai) itu sendiri. Selain itu, upaya fusi partai yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru Soeharto berupaya agar dapat menjadikan PPP sebagai partai Islam transideologi, yang terdiri dari sayap Islam modernis dan tradisional, dengan kebijakan ini fragmentasi tidak akan terjadi.

Tetapi benturan terhadap kepentingan individu dan kelompok-kelompok Islam yang berlatar belakang berbeda, baik dari kalangan

modernis yang diwakili oleh MI maupun dari kalangan tradisional NU tidak dapat dielakkan karena berbagai kepentingan, baik itu jatah kursi kekuasaan di parlemen ataupun factor ideology, politik dan faktor sosial organisasi yang ada dimasing-masing internal MI dan NU.

Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa faktor penyebab konflik PPP dimasa Orde Baru adalah perbedaan pandangan dan pendapat dari para elit dan golongan partai PPP yang ada didalamnya, termasuk pelembagaan PPP sebagai wadah deideologisasi yang dilakukan pemerintah Soeharto untuk mencegah konflik internal di dalam kelompok Islam yang telah lama terjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan perbedaan kepentingan politik dari pemerintah, maupun kepentingan golongan dalam tubuh PPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachry, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*, 1996
- Bolan, B.J, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta; LP3ES, 1985, hal. 148
- Bruinessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 1994
- Haris, Syamsuddin, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta, Grasindo, 1991, hal. 48
- Haris, Syamsudin, *Partai, Pemilu dan Parlemen: Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Ihsan, Bakir, 2016, *Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP dalam Memasukkan Nilai-Nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi*, Jakarta: Orbit Publishing
- Kellstedt, David C. Leege dan Lyman A. (ed), *Agama dalam Politik Amerika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i dalam *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Magenda, Burhan (ed), *Sikap Politik Tiga Kontestan*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1992
- Mashad, Duroruddin, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, 1991, Jakarta, Rajawali Press

- Noer, Deliar, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983
- Noor, Firman, *Perpecahan dan Solidaritas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*, Jakarta: LIPI Press
- Qodir, Zuly, 2012, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar
- Romli, Lili, *Islam Yes, Partai Islam Yes*, Jakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Ilmu Politik- LIPI, 2006
- Suryadinata, *Political Parties and The 1982 General Election in Indonesia*, Singapore: Institute of South East Asian Studies, 1982
- Tebba, Sudirman, *Islam menuju Era Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana